

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki banyak kekayaan alam yang memukau serta kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, yang menarik minat baik wisatawan domestik maupun internasional (Jabbar & Baqibillah, 2024). Terdapat banyak potensi wisata yang ada di Indonesia yang sangat variatif mulai dari pantai yang menakjubkan, hutan tropis yang lebat, hingga pegunungan yang megah (Sajidah, 2025). Selain wisata alam, Indonesia juga memiliki wisata budaya yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat lokal (Sajidah, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan pada sektor pariwisata di Indonesia. Pemerintah Kabupaten atau Kota telah diamanatkan untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan kegiatan pariwisata di wilayahnya masing-masing melalui Undang-Undang kepariwisataan No. 10 tahun 2009, yang mana diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan dalam peluang usaha serta memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, (Sajidah, 2025).

Terdapat Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 terkait Kepariwisata yang didalamnya menjelaskan bahwa sektor pariwisata berperan penting dalam pewujudan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa sektor pariwisata berfungsi dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, serta intelektual bagi para wisatawan melalui adanya rekreasi dan perjalanan, serta telah meningkatkan pendapatan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (Pebriana, F., *et all*, 2021). Pengembangan dalam sektor pariwisata dapat meningkatkan potensi untuk menaikkan pendapatan pada suatu daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata mengalami peningkatan yang terlihat pada pendapatan daerah Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang menyumbang sebesar 5,8% dan diperkirakan akan terus meningkat mencapai 7,4% pada tahun 2027 mendatang (BPS), 2023).

Terdapat beragam jenis wisata yang berkembang di Indonesia, mulai dari wisata kuliner, wisata budaya, wisata sejarah, wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan, wisata sejarah, wisata religi, wisata seni, hingga wisata olahraga seperti aktivitas pendakian yang semakin diminati masyarakat (Rahafuna, 2025). Dibalik berbagai manfaat yang dihasilkan dari sektor pariwisata, sektor ini juga menyumbang beberapa tantangan dan permasalahan. Aktivitas pariwisata berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti peningkatan polusi udara, limbah padat atau sampah, tingginya penggunaan air bersih serta pencemaran limbah cair (Agustina & Muliadiasa, 2023). Selain itu, masih banyak potensi besar pada wisata-wisata di pelosok yang belum terekspose meskipun memiliki peluang besar untuk dikembangkan (Annisa Herlia Putri, Situ Asih, 2026). Dalam kondisi seperti ini, pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijak menjadi faktor kunci dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi wisata yang sangat besar dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, hingga wisata buatan yang tersebar di 27 kabupaten dan kota, sebagaimana data BPS (2024) yang mencatat lebih dari 64 juta kunjungan wisatawan ke objek wisata di Provinsi Jawa Barat. (Habibi *et al.*, 2025).

Salah satu bentuk wisata alam yang berkembang pesat di Indonesia adalah wisata pendakian. Indonesia memiliki lebih dari 129 gunung berapi yang tersebar di berbagai wilayah, dengan 76 diantaranya tergolong kedalam gunung api aktif (Annisa Herlia Putri, Situ Asih, 2026). Salah satu wisata pendakian yang terkenal hingga mancanegara dengan panorama alam yang indah yakni Gunung Rinjani yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, terdapat juga wisata pegunungan lainnya yang terkenal hingga mancanegara seperti Gunung Merbabu yang berada di Magelang, Jawa Tengah, Gunung Gede Pangrango yang berada di Jawa Barat, Gunung Kerinci yang terletak di pulau Sumatra, Gunung Bromo dan Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur, dan gunung-gunung lainnya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan rekreasi di alam bebas seperti pada aktivitas pendakian kini semakin digemari oleh masyarakat luas (Wuisan *et*

*al.*, 2025). Berbagai lokasi wisata alam pegunungan di Jawa Barat seperti pada wilayah Bandung, Bogor, dan Garut menjadi destinasi favorit bagi wisatawan lokal. Tempat tersebut seringkali dipenuhi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam dan udara segar di pegunungan (Herdiansah, 2021).

Di wilayah Jawa Barat, salah satu wisata pendakian yang cukup populer adalah Gunung Kerenceng yang terletak di Kabupaten Sumedang, tepatnya berada di Kampung Jambu Air, Desa Sidulang, Kecamatan Cimanggung, yakni di perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Cicalengka, Kabupaten Bandung (Garnia *et al.*, 2023). Dengan ketinggian 1.754 meter di atas permukaan laut, gunung ini memiliki bentuk *strato* atau kerucut yang menawarkan keindahan alam di puncaknya berupa pemandangan kota Bandung dan kabupaten Sumedang dari ketinggian yang terlihat Gunung lain seperti Gunung Ciremai, Cikuray, dan beberapa gunung Jawa Barat lainnya (Garnia *et al.*, 2023). Gunung Kerenceng merupakan destinasi wisata *hidden gem* yang tergolong sangat cocok untuk pendaki pemula karena jalurnya yang relatif pendek dengan waktu tempuh sekitar 2-4 jam menuju puncak, meskipun terdapat beberapa medan cukup menantang dengan jalur terjal dan jurang curam. Saat ini, wisata Gunung Kerenceng dikelola oleh pihak Karang Taruna Dusun Babakan Jambu Air dengan biaya registrasi sebesar 10.000 rupiah per orang (Garnia *et al.*, 2023).

Nampaknya wisata pendakian menjadi daya tarik tersendiri, karena bukan hanya keindahan alam yang dicari, tetapi juga menawarkan pengalaman berpetualang, kepuasan saat menggapai puncak, serta menguji adrenalin (Aisyah, Nisrina, 2025). Namun dibalik daya tarik yang ditawarkan, wisata pendakian di Indonesia juga seringkali mengalami berbagai permasalahan yang serius. Salah satu permasalahan besar yang dialami oleh kawasan wisata, termasuk wisata pendakian adalah permasalahan sampah yang dihasilkan dari aktivitas pendakian (Herdiansah, 2021). Pertumbuhan pesat pada sektor pariwisata akan mendorong meningkatnya jumlah sampah di destinasi wisata, di mana sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisata tersebut dapat mengancam kualitas lingkungan apabila tidak dikelola dengan

baik (Hilman *et al.*, 2023). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ismail & Handrito, 2024). Tingkat kesadaran pendaki terhadap menjaga lingkungan dan keberlanjutan ekonomi hijau masih rendah. Hal tersebut terlihat dari adanya permasalahan sampah yang terjadi secara berulang kali seperti adanya kasus penutupan sementara Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akibat permasalahan sampah yang ditimbulkan dari ulah pendaki nakal (Azeharie *et al.*, 2022). Terdapat juga permasalahan lain seperti minimnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, serta kurang maksimalnya sistem pengelolaan wisata (Lepar, B. S., & Sari, 2024).

Keterlibatan masyarakat lokal merupakan elemen penting dalam mendukung perkembangan di suatu wisata. Berdasarkan hasil temuan dari Satrio dan Arviana, (2023), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam perkembangan wisata yang berkelanjutan. Bentuk partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pada program wisata (Satrio & Arviana, 2023). Masyarakat lokal termasuk bagian yang sudah melekat dalam destinasi wisata setempat, sehingga memiliki peran penting karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam terkait potensi alam dan budaya setempat, sehingga adanya keterlibatan mereka sejak awal didirikan suatu wisata dapat mendorong percepatan dan keberhasilan dalam proses pengelolaan wisata (Doni Ikhlas *et al.*, 2024). Hasil temuan dari Abdul Khalim dan Yuke Hernawati, (2024) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat akan menghambat keberhasilan pada perkembangan di suatu wisata yang diakibatkan kurangnya akses informasi pada kondisi lokasi. Dengan demikian, dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat sekitar dapat memungkinkan keberlanjutan pada pengelolaan destinasi wisata (Abdul Khalim & Yuke Hernawati, 2024).

Adanya keterlibatan partisipasi aktif pada masyarakat sekitar pada pengelolaan wisata dapat memungkinkan terciptanya ekonomi hijau yang berkelanjutan (Herdiansah, 2021). Dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga faktor utama yakni ekonomi, lingkungan, serta sosial. Ekonomi

hijau merupakan ekonomi yang menghasilkan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta mengurangi risiko lingkungan dari adanya kelangkaan ekologis secara signifikan (Firmansyah, 2022). Penerapan ekonomi hijau pada sektor pariwisata cukup relevan, hal ini dikarenakan sektor pariwisata sangat bergantung pada kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Dalam konsep ekonomi hijau, terjadinya peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat didorong oleh investasi publik dan swasta kepada kegiatan ekonomi, infrastruktur, aset yang dapat mencapai pengurangan emisi karbon dan polusi, serta peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, sekaligus pencegahan pada berkurangnya keanekaragaman hayati (Diputra, 2024).

Sejalan dengan uraian tersebut, pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Wisata Pendakian Gunung Kerenceng merupakan salah satu destinasi wisata pendakian di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sumedang, yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan pendaki serta memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun, di sisi lain masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam pengelolaan wisata yang belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek tata kelola, keterlibatan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan (Garnia *et al.*, 2023). Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena pengelolaan wisata pendakian di Gunung Kerenceng dengan berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ekonomi hijau. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melibatkan berbagai pihak yang meliputi pengurus dan pengelola *basecamp* Gunung Kerenceng, tokoh masyarakat setempat, serta pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan wisata.

Nampaknya berdasarkan fenomena yang terjadi, teori Tangga Partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein melalui konsep *A Ladder of Citizen Participation* relevan untuk digunakan dalam konteks pengembangan pariwisata. Arnstein memandang partisipasi masyarakat sebagai bentuk redistribusi kekuasaan antara pihak yang memiliki

kewenangan dengan masyarakat yang selama ini berada pada posisi yang kurang berdaya. Partisipasi tidak dimaknai sekadar sebagai keikutsertaan formal atau simbolik, melainkan sebagai sejauh mana masyarakat memiliki kendali dan pengaruh dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, serta hasil akhir dari suatu program atau kebijakan (Arnstein, 1969). Oleh karena itu, Arnstein menyusun delapan tingkatan partisipasi masyarakat yang digambarkan dalam bentuk tangga partisipasi, mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi berdasarkan besarnya kekuasaan yang dimiliki masyarakat. Delapan tingkatan tersebut terdiri atas manipulasi dan terapi yang dikategorikan sebagai bentuk *non-participation*, di mana masyarakat hanya dijadikan objek legitimasi kebijakan tanpa memiliki peran nyata. Tingkatan selanjutnya adalah *informing*, *consultation*, dan *placation* yang termasuk dalam kategori *tokenism*, yaitu kondisi ketika masyarakat telah diberi ruang untuk mengetahui, menyampaikan pendapat, atau memberikan masukan, namun tidak memiliki jaminan bahwa aspirasi tersebut akan memengaruhi keputusan akhir (Arnstein, 1969). Adapun pada tingkatan tertinggi yaitu *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*, masyarakat memiliki posisi yang lebih kuat dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, bahkan memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan program secara mandiri (Arnstein, 1969).

Pendekatan teori partisipasi Arnstein relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Wisata Pendakian Gunung Kerenceng. Dalam konteks pengelolaan wisata pendakian, keterlibatan masyarakat lokal seperti pengelola *basecamp*, Karang Taruna, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta warga sekitar perlu dianalisis tidak hanya dari aspek keikutsertaan mereka dalam aktivitas wisata, tetapi juga dari sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas wisata. Selain itu, teori Arnstein juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya mewujudkan ekonomi hijau dalam pengelolaan wisata pendakian. Penerapan ekonomi hijau menuntut adanya pengelolaan sumber

daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Partisipasi masyarakat yang berada pada tingkat kemitraan atau pembagian kekuasaan memungkinkan masyarakat memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kawasan wisata, sehingga mendorong perilaku menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan (Arnstein, 1969). Dengan demikian, melalui pendekatan teori partisipasi Arnstein penelitian ini diharapkan mampu mengkaji secara komprehensif terkait posisi dan peran masyarakat dalam pengelolaan Wisata Pendakian Gunung Kerenceng serta kontribusinya dalam mewujudkan ekonomi hijau.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi, penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan utama yaitu: pertama, Wisata Pendakian Gunung Kerenceng memiliki potensi besar sebagai salah satu destinasi wisata pendakian di Jawa Barat yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar, akan tetapi dalam pengelolaannya masih memerlukan optimalisasi melalui peningkatan pada partisipasi masyarakat yang aktif. Kedua, permasalahan umum yang terjadi dalam sektor wisata pendakian di Indonesia yaitu berupa kerusakan lingkungan, masalah sampah, serta kurangnya tata kelola yang juga memungkinkan akan terjadi di Gunung Kerenceng apabila tidak ada upaya pengelolaan yang tepat berbasis ekonomi hijau. Ketiga, Gunung Kerenceng tergolong sebagai gunung dengan jalur yang relatif mudah dan cocok untuk pemula ataupun yang baru ingin mencoba kegiatan pendakian sehingga akan menjadi nilai tambah bagi pengalaman mereka apabila pengelolaan dan fasilitasnya sudah maksimal. Keempat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan model pengelolaan wisata pendakian yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal. Kelima, dengan penggunaan Pendekatan teori partisipasi Arnstein pada penelitian ini mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Dengan demikian, penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Wisata Pendakian untuk mewujudkan ekonomi hijau di Wisata Gunung Kerenceng, Kabupaten Sumedang” ini memiliki urgensi yang tinggi dan diharapkan mampu memberikan solusi yang nyata dalam mengoptimalkan pengelolaan wisata pendakian yang berkelanjutan dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini

1. Bagaimana deskripsi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Gunung Kerenceng?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Gunung Kerenceng dalam mewujudkan Ekonomi Hijau?
3. Bagaimana upaya kolaborasi antara masyarakat, pengelola, dan pemerintah dalam mewujudkan Ekonomi Hijau pada pengelolaan wisata pendakian Gunung Kerenceng?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis deskripsi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Gunung Kerenceng.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Gunung Kerenceng dalam mewujudkan Ekonomi Hijau.
3. Bagaimana upaya kolaborasi antara masyarakat, pengelola, dan pemerintah dalam mewujudkan Ekonomi Hijau pada pengelolaan wisata pendakian Gunung Kerenceng?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap temuan dalam penelitian ini akan memiliki manfaat akademik dan praktis di masa yang akan datang, antara lain yaitu:

## 1. Kegunaan Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi pariwisata, Pengelolaan wisata berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini akan memperkaya literatur akademik terkait penerapan teori partisipasi, khususnya partisipasi masyarakat menurut Arnstein dalam konteks pengembangan wisata alam yang berkelanjutan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti lain yang hendak melakukan kajian lebih lanjut mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata untuk mewujudkan ekonomi hijau, khususnya pada wisata pendakian. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terkait sosiologi lingkungan dan ekonomi hijau yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan wisata berkelanjutan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pengelola Wisata Pendakian Gunung Kerenceng, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, evaluasi, serta rekomendasi yang berguna dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wisata berbasis partisipasi masyarakat dan prinsip ekonomi hijau. Hasil temuan penelitian ini dapat membantu pengelola dalam mengidentifikasi aspek pengelolaan yang masih lemah seperti minimnya koordinasi dengan masyarakat lokal, kurangnya edukasi terkait konservasi alam bagi pendaki, serta belum optimalnya sistem pengawasan lingkungan.
- b. Bagi pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan wisata pendakian dan strategi ekonomi hijau berbasis masyarakat. Hasil

temuan dapat membantu pemerintah dalam menilai keberhasilan pada kebijakan pariwisata yang sudah berjalan, sehingga dapat membantu dalam proses penyusunan suatu kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kondisi wisata seperti memperkuat regulasi konservasi, penyusunan standar pengelolaan jalur pendakian, serta integrasi program ekonomi hijau kedalam Pembangunan wisata.

- c. Bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan gunung Kerenceng, penelitian ini diharapkan dapat mendorong dalam peningkatan kapasitas, peran, serta manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan di wisata pendakian Gunung Kerenceng. Hasil temuan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola potensi sekitar dengan baik, serta menciptakan peluang ekonomi hijau melalui kegiatan usaha seperti jasa pemandu lokal, pengelolaan parkir yang baik, kuliner lokal, serta produk kerajinan yang ramah lingkungan.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan konseptual untuk mengarahkan alur pemikiran peneliti secara sistematis dan terstruktur. Kerangka berpikir disusun untuk mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian memiliki arah yang jelas dan terukur. Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata pendakian untuk mewujudkan ekonomi hijau menempatkan partisipasi masyarakat sebagai variabel kunci dalam memahami dinamika pengelolaan wisata di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan teori yang mampu menjelaskan tidak hanya bentuk keterlibatan masyarakat, tetapi juga kualitas serta tingkat kekuasaan masyarakat dalam proses pengelolaan wisata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Partisipasi Masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein sebagai landasan analisis dalam

mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata pendakian Gunung Kerenceng untuk mewujudkan ekonomi hijau. Arnstein memandang partisipasi masyarakat sebagai suatu bentuk redistribusi kekuasaan yang memungkinkan masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini kurang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, untuk terlibat secara nyata dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan wisata (Arnstein, 1969).

Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai keikutsertaan formal atau keterlibatan fisik semata, melainkan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu program. Untuk menjelaskan hal tersebut, Arnstein mengemukakan konsep Tangga Partisipasi Masyarakat (*Ladder of Citizen Participation*) yang terdiri atas delapan tingkatan partisipasi, yang disusun berdasarkan tingkat kekuasaan masyarakat dalam menentukan hasil akhir suatu program. Delapan tingkatan partisipasi tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Tingkatan paling bawah adalah *non-participation*, yang terdiri atas manipulasi dan terasi, di mana masyarakat hanya dijadikan objek atau alat legitimasi kebijakan tanpa memiliki peran substantif. Tingkatan selanjutnya adalah *tokenism*, yang meliputi *informing*, *consultation*, dan *placation*, yaitu kondisi ketika masyarakat telah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, namun belum memiliki jaminan bahwa aspirasi tersebut akan diakomodasi dalam pengambilan keputusan (Arnstein, 1969). Adapun tingkatan tertinggi adalah *citizen power*, yang mencakup *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*, di mana masyarakat memiliki posisi tawar yang kuat, terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, hingga memiliki kendali dalam pengelolaan program (Arnstein, 1969).

Dalam konteks pengelolaan wisata pendakian Gunung Kerenceng, teori Arnstein digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Arnstein menekankan bahwa partisipasi harus dipandang sebagai tingkat kekuasaan warga dalam menentukan keputusan dan hasil akhir

program, mulai dari bentuk partisipasi semu (*non-participation*), partisipasi simbolik (*tokenism*), hingga pembagian kekuasaan yang nyata (*citizen power*) (Arnstein, 1969). Masyarakat lokal seperti pengelola *basecamp*, Karang Taruna, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta warga sekitar kawasan wisata tidak hanya dilihat dari keterlibatan mereka dalam aktivitas operasional wisata, tetapi juga dari sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan wisata.

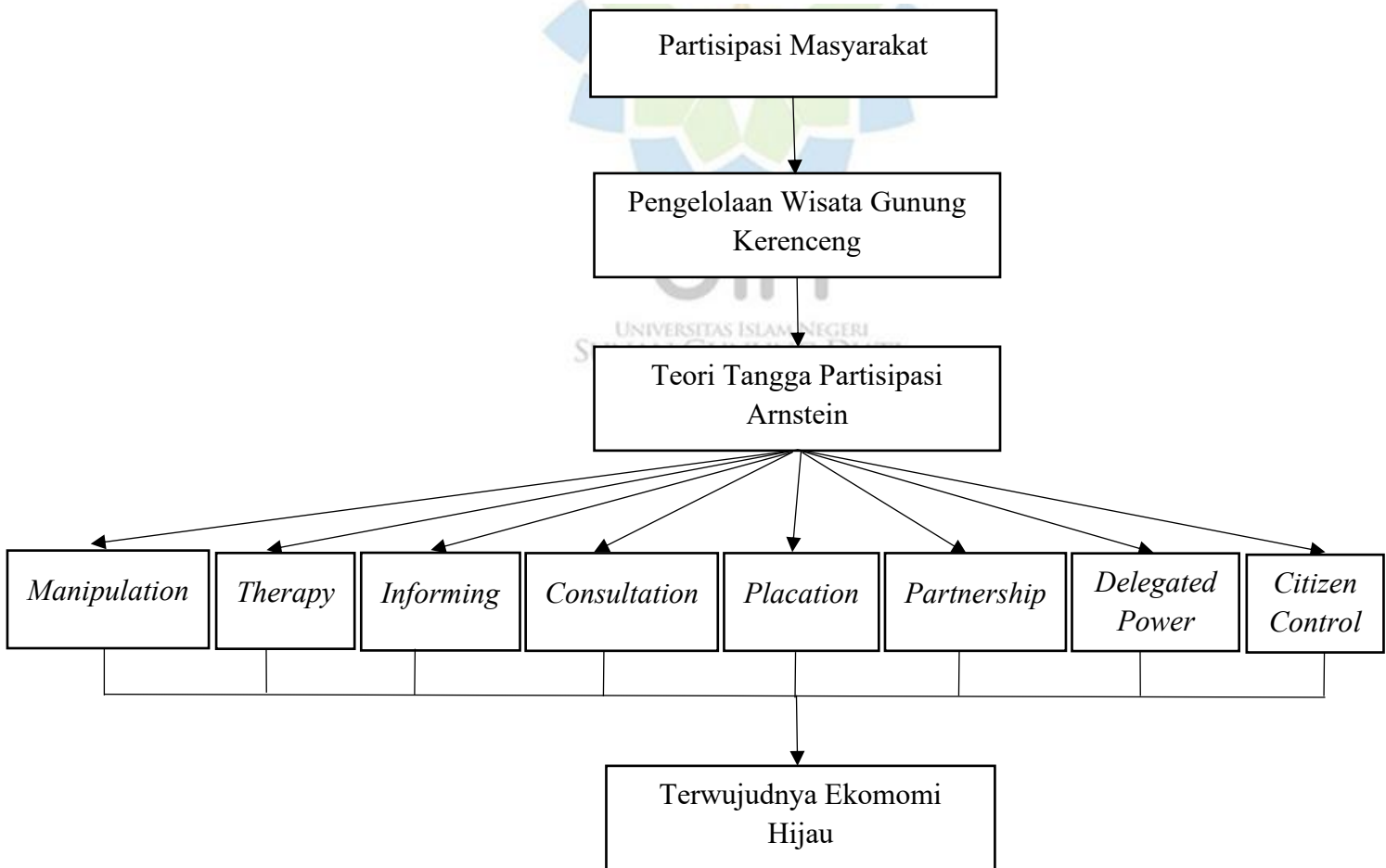
Partisipasi masyarakat pada tingkat kemitraan (*partnership*) dalam pengelolaan wisata pendakian dapat tercermin melalui adanya kerja sama antara masyarakat, pengelola, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan wisata, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme pengambilan keputusan bersama. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi, seperti *delegated power*, dapat dilihat dari adanya pelimpahan kewenangan kepada kelompok masyarakat lokal untuk mengelola aspek tertentu dari wisata pendakian, seperti pengelolaan *basecamp*, sistem retribusi, atau pengelolaan UMKM wisata. Sementara itu, pada tingkat *citizen control*, masyarakat memiliki kendali yang lebih luas dalam pengelolaan wisata secara mandiri melalui kelembagaan lokal seperti kelompok sadar wisata, koperasi wisata, atau badan usaha milik desa (Arnstein, 1969).

Pendekatan teori partisipasi Arnstein memiliki relevansi yang kuat dengan upaya mewujudkan ekonomi hijau dalam pengelolaan wisata pendakian. Konsep ekonomi hijau menekankan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pengelolaan wisata, tingkat partisipasi masyarakat yang masih berada pada kategori *tokenism* yang mana cenderung menghasilkan pengelolaan wisata yang kurang berkelanjutan karena masyarakat belum memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan serta belum merasakan manfaat ekonomi secara adil. Sebaliknya, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, terutama ketika masyarakat memiliki ruang pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan wisata, memperkuat dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, serta mendorong

praktik pengelolaan wisata yang berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan maupun ekonomi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata pendakian, semakin besar pula peluang terwujudnya pengelolaan wisata yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau.

Dengan demikian, melalui pendekatan teori partisipasi Arnstein, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif posisi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Wisata Pendakian Gunung Kerenceng serta implikasinya terhadap upaya mewujudkan ekonomi hijau. Kerangka berpikir ini menjadi dasar dalam merumuskan fokus penelitian, indikator analisis, serta penarikan kesimpulan mengenai hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan wisata pendakian.

**Gambar 3. 1** Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2025.